**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Penelitian**

Sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri atas zat organik dan zat anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan. Sampah pada umumnya dalam bentuk sisa makanan (sampah dapur), daun-daunan, ranting pohon, kertas/karton, plastik, kain bekas, kaleng-kaleng, debu sisa penyapuan, dsb (SNI 19-2454-1991). Pengelolaan sampah sangatlah penting, karena bahaya sampah yang sangat merugikan bagi pembangunan maupun kesehatan manusia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomer 81 Tahun 2012 Pasal 4 ayat 3 tentang pengelolaan sampah bahwa setiap Kabupaten/Kota harus memiliki kebijakan dan strategis dalam pengelolaan sampah.

jika dilihat dari teknik pengelolaan sampah yang dilakukan selama ini yakni Sistem pengelolaan persampahan yang dilakukan dengan cara Kumpul-Angkut- Buang, kedepan tidak akan menyelesaikan masalah sampah bahkan dapat menimbulkan darurat sampah, hal ini disebabkan :

• Laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat

• Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan

• Sulit mencari atau menentukan lokasi TPPAS

• Keterbatasan sarana dan prasarana pengangkutan sampah, sehingga timbulan sampah yang tidak tertangani atau tidak terangkut semakin besar. beban Pemerintah Daerah dalarn mengatasi permasalahan sampah tentunya akan sangat berat tanpa adanya dukungan dan peran serta masyarakat, maka permasalahan sampah tidak akan berhasil dengan baik.

Keadaan sampah di Kabupaten Bandung Barat pada saat ini masih belum terkelola dengan baik, di setiap jalan masih ada penumpukan sampah yang dimana jika terjadi turun hujan akan mengakibatkan banjir atau akan terjadi genangan di jalan tersebut. Keadaan sungai yang ada di Kabupaten Bandung Barat masih banyak sampah yang seharusnya tidak ada di sungai tersebut. Jadi kesadaran masyarakat Bandung Barat harus di kasih arahan dan penjelasan serta tindakan untuk masyarakat.

Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat membuat peraturan daerah tentang persampahan yakni Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Sampah yang dimana pada Pasal 13 Dan 18 bahwa pengelolaan sampah dilakukan di TPSS (Tempat Pembuangan Sementara Sampah) lalu dikirim ke TPPAS (Tempat Pembuangan dan Pengelolaan Akhir Sampah), yang dimana berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah dan Pelayanan Sampah berdasarkan Pasal 27 Ayat 2 dan Pasal 30 bahwa pengelolaan sampah dilakukan oleh satuan unit kerja dibawah satuan Dinas.

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat adalah Dinas yang menangani persoalan tentang persampah, yang dimana Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kebersihan, yang dimana ditugaskan untuk pelaksana teknis pengelolaan sampah Kabupaten Bandung Barat.

UPT Kebersihan sebagai pelaksana teknis yang di tugas kan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 55 Tahun 2012, bahwa UPT Kebersihan melaksanakan tugas dalam mengelola sampah Kabupaten Bandung Barat sesuai Tugas Pokok dan Fungsi UPT Kebersihan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat.

Kabupaten Bandung Barat memiliki jumlah warga cukup besar yakni sekitar 1.200.000 jiwa, yang dimana sesuai SNI 19-3964-1994 bahwa Satuan timbulan sampah pada kota sedang/kecil : 1,5 – 2 L/org/hari atau 0,3 – 0,4 kg/org/hari. Maka jumlah sampah yang dapat ditimbulkan oleh Kabupaten Bandung Barat bisa mencapai sekitar 480 ton per-hari tentu hal seperti ini bisa menjadi masalah yang cukup besar bila tidak di kelola dengan baik oleh Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat memiliki UPT yakni salah satunya adalah UPT Kebersihan yang dimana UPT ini di tugaskan secara langsung oleh Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat untuk membantu tugas dari Seksi Persampahan khususnya di pengelolaan sampah.

Peran serta masyarakat adalah hal terpenting dari pengelolaan sampah yang baik, supaya petugas pengelolaan sampah daerah yaitu UPT Kebersihan dapat bekerja lebih efesien lagi.

Selain dari pada itu pengelolaan sampah di daerah Kabupaten Bandung Barat masih belum sesuai dengan standar perhitungan sampah berdasarkan perhitungan SNI 19-3964-1994 bahwa setiap orang menghasilkan 0,4 kg, maka UPT Kebersihan sebagai organisasi pemerintahan yang dimana harus dapat mengelola sampah dari TPSS (Tempat Pembuangan Sementara Sampah) ke TPPAS (Tempat Pembuangan dan Pengelolaan Akhir Sampah) yakni sebesar 480 ton dari data Laporan Presentase Pengelolaan Sampah 2011 , akan tetapi pada kenyataannya yang di dapat dari data yang diberikan oleh pihak UPT Kebersihan yakni baru bisa di angkut dari TPPAS ke TPAS hanya 76,40 ton atau dalam presentase hanya 15,9%, jadi UPT Kebersihan belum dapat bekerja secara maksimal masih ada sisa sekitar 84,1% jadi masih cukup besar sampah yang harus diangkut oleh UPT Kebersihan itu sebuah fakta yang cukup bermasalah dalam proses pembangunan khusus nya dalam segi pengelolaan sampah.

Teknik pengelolaan sampah yang dilakukan di TPPAS Sari Mukti yakni teknik semi *Sanitary Landfill* yang dimana pengertian *Sanitary Landfill*: Merupakan sistem pembuangan akhir sampah yang dilakukan dengan cara sampah ditimbun pada lokasi TPA yang sudah disiapkan sebelumnya. Kemudian dilakukan penimbunan dan pemadatan menggunakan alat berat. Selanjutnya dilakukan proses penutupan dengan tanah dan dilakukan setiap hari pada setiap akhir kegiatan.

TPPAS Sari Mukti belum bisa melakukan teknik *Sanitary Landfill* tetapi menggunakan semi Sanitary Landfill yang dimana prosesnya sama tetapi waktunya berbeda yaitu dilakukan 1 minggu sekali dan 1 bulan sekali yang menggunakan semi *Sanitary Landfill* kebanyakan sampah anorganik tetapi ada juga sampah organik.

Sedangkan sampah organik di TPPAS Sari Mukti bisa dikelola menjadi pupuk kompos yang dimana disebut teknik kompossing.

Dari segi keefektivitasan tentu UPT Kebersihan belum mampu untuk bekerja lebih baik karena jika kita lihat dari hasil yang ada, UPT kebersihan belum bisa mengangkut sampah secara keseluruhan dari TPSS ke TPPAS dengan maksimal. Karena dalam pengertian efektivitas yakni Penyelesaian suatu pekerjaan yang didasari dengan hasil yang baik dari jumlah pekerjaan yang ada terhadap ketepatan waktu yang telah ditentukan. Hal ini juga dapat menjadi ukuran terhadap keperilakuan suatu organisasi yang dimana suatu pekerjaan bisa berjalan dengan semestinya dan bisa efektif, tentu perilaku suatu organisasi tersebut bisa dikatakan baik dan sudah sesuai sebagaimana mestinya.

Selain daripada itu wilayah pelayanan yang baru bisa terlayani oleh UPT Kebersihan hanya baru sekitar 10 kecamatan dari keseluruhan jumlah kecamatan Kabupaten Bandung Barat yakni 16 kecamatan.

 Berdasarkan hasil penjajagan pada tanggal 07 Desember 2014 s/d 07 Januari 2015, peneliti menyimpulkan bahwa masalah yang terjadi dalam mengelola sampah di Kabupaten Bandung Barat belum efektif, hal ini dapat dilihat berdasarkan:

1. **Penyelesaian pekerjaan**

Penyelesaian pekerjaan tidak tepat waktu, sehingga sampah tidak terangkat. Contoh: volume sampah yang terangkut sehari 76, 41 ton dari 480 ton sehari, maka akan mengakibatkan penumpukan di setiap Tempat Penyimpan Sementara Sampah ataupun akan terjadi penumpukan di jalan-jalan raya ataupun dilingkungan warga-warga apabila tidak di kelola.

1. **Hasil kerja**

Hasil kerja pegawai UPT Kebersihan bekerja kurang maksimal, sehingga target pekerjaan tidak tercapai, yang dapat dilihat dari data yang ada. Contoh : baru 10 kecamatan yang mendapat pelayanan dari 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung Barat, jadi masih ada 6 kecamatan yang belum terlayani oleh UPT Kebersihan sebagai Organisasi yang di utus oleh Kabupaten Bandung Barat untuk mengelola sampah. .

Permasalahan tersebut peneliti menduga di sebabkan oleh perilaku organisasi yang belum dilaksanakan berdasarkan unsur-unsur organisasi sehingga membuat kurang berjalan dengan efektif.

* 1. **Teknologi**

Faktor penunjang dari suatu organisasi adalah ketersedian kendaraan operasional dan teknologi yang digunakan masih teknologi lama yakni 3R (reduce, re ) yang dimana seharusnya ada teknik baru yang digunakan oleh masyarakat ataupun yang digunakan di TPPAS Sari Mukti, selain kendaraan yang cukup, teknologi pengelolaan sampah yang harus diperbaiki dalam mengelola akhir sampah maka akan terjadi keefektivitasan dalam organisasi, akan tetapi UPT Kebersihan Kabupaten Bandung Barat masih kurang kendaraan operasional untuk pengangkutan dari TPSS ke TPPAS dimana UPT Kebersihan Kabupaten Bandung Barat hanya memiliki 20 kendaraan operasional untuk pengangkutan dari TPSS ke TPPAS. Dan teknologi yang digunakan masih semi *Sanitary Landfill*

* 1. **Orang- orang**

UPT Kebersihan Kabupaten Bandung Barat masih kekurangan orang khususnya dalam hal pengangkutan sampah itu terlihat dari hasil kerja dan masih kurangnya orang yang efektif dalam kerja.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai perilaku organisasi dan efektivitas kerja pegawai pengelolaan sampah yang dituangkan dalam bentuk laporan penelitian dengan mengambil judul: **“PENGARUH PERILAKU ORGANISASI TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI UPT KEBERSIHAN DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN BANDUNG BARAT”.**

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka peneliti merumuskan pernyataan masalah sebagai berikut :

“Perilaku Organisasi Belum Berpengaruh Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai UPT Kebersihan Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat.”

 Mengacu pada pernyataan masalah diatas peneliti mengemukakan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah Perilaku Organisasi Berpengaruh Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai UPT Kebersihan Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat ?
2. Berapa Besar Pengaruh Perilaku Organisasi Melalui Dimensi Orang-orang, Struktur, Teknologi dan Lingkungan Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai UPT Kebersihan Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat
3. **Tujuan dan Kegunaan penelitian**

Penelitian ini dilakasanakan untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Adapun tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. **Tujuan Penelitian**

Mengetahui, memperoleh, mendapatkan, dan menganalisis data tentang pengaruh perilaku organisasi terhadap efektivitas kerja pegawai dalam UPT Kebersihan di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat.

1. **Kegunaan Penelitian**
2. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta memperluas wawasan dalam menerapkan teori-teori khususnya tentang pengaruh perilaku organisasi terhadap efektivitas kerja pegawai UPT Kebersihan di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat.

1. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan untuk pertimbangan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat mengenai masalah pengaruh perilaku organisasi terhadap efektivitas kerja pegawai pada UPT Kebersihan di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat.

1. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya bagi peneliti, mengenai pengaruh perilaku organisasi terhadap efektivitas kerja pegawai UPT Kebersihan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat.